

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	0
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Kompas	Sindo	Tempo
Indopos	Pos Kota	Warta Kota

## Pajak Pengelola Parkir di Jakarta Bakal Dinaikkan

Kenaikan pajak parkir itu diyakini bakal berpengaruh pada masyarakat.

### Francisco Rosarians

francisco@tempo.co.id

**JAKARTA** — Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jakarta sepakat merevisi Pasal 5 ayat 2 Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir. Dalam klausul tersebut, eksekutif dan legislatif berencana menaikkan pajak bagi pengelola dan pemilik parkir dari 20 persen menjadi 30 persen.

“Sudah sepuluh tahun tak ada kenaikan. Di daerah penyangga saja (Bekasi, Bogor, Tangerang), pajaknya sudah 25-30 persen,” kata Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Jakarta Pantas Nainggolan kepada *Tempo*, kemarin.

Pemerintah Jakarta sebenarnya sudah berencana menaikkan pajak pengelolaan parkir itu sejak Agustus 2017. Namun rencana itu belum pernah dibahas bersama badan legislatif. Memasuki 2020, pemerintah baru menuntaskan draf revisi Perda Nomor 16 Tahun

2010. Januari lalu, draf itu telah diserahkan ke Dewan.

Tak tercapainya target penerimaan pajak daerah pada 2019 menjadi salah satu pendorong untuk segera merevisi Perda Nomor 16 itu. Bahkan, pemerintah terpaksa menunda atau memotong sebagian besar rencana anggaran belanja di sejumlah satuan kerja

Belanja Daerah Perubahan 2019, Pemprov DKI Jakarta mengumpulkan pajak parkir sebesar Rp 536 miliar dari target Rp 525 miliar.

Meski demikian, Pemprov dan DPRD menilai potensi penerimaan pajak dari parkir sebenarnya mencapai Rp 837 miliar per tahun. Hal ini didasarkan pada jumlah rata-rata kendaraan bermotor yang

DKI Jakarta menerapkan pelaporan penerimaan pajak secara daring atau *online*. Dia menilai semua data obyek pajak secara faktual harus terhubung dengan Badan Penerimaan Daerah. Hal ini memungkinkan pemerintah menerima data *real* jumlah konsumen parkir di semua tempat pengelolaan parkir. “Sekarang ini banyak bocornya,” ujar Pantas.

Pejabat pelaksana tugas Bapenda DKI Jakarta, Sri Haryati, mengatakan lembaganya memang akan menerapkan pengawasan obyek pajak secara *online*. Empat wajib pajak yang menjadi sasaran pengawasan *online* ini adalah data konsumen hotel, restoran, tempat hiburan, dan parkir. Bapenda, menurut dia, akan menggandeng tiga bank pelat merah, yaitu BNI, BRI, dan Bank DKI untuk meng-*install* sistem pelaporan *online* di setiap lokasi obyek pajak. “Nantinya, kami akan mendapatkan hasil pelaporan pajak sesuai transaksi yang terjadi, sebenarnya, dan *real*,” kata Sri.

Selain itu, dalam rapat

**“Sudah sepuluh tahun tak ada kenaikan. Di daerah penyangga saja, pajaknya sudah 25-30 persen.”**

### Pantas Nainggolan

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Jakarta

perangkat daerah (SKPD). Hingga akhir 2019, penerimaan total pajak DKI Jakarta hanya Rp 39,5 triliun dari target sebesar Rp 44 triliun.

Sebenarnya, dari 13 komponen pajak di DKI Jakarta, salah satu pajak yang mencapai target penerimaan adalah pajak parkir. Berdasarkan data Anggaran Pendapatan dan

melintas di jalan Ibu Kota, yaitu 900 mobil dan 1.400 sepeda motor per hari. “Asumsi kami, harusnya lebih dari Rp 500 miliar. Kasatmata saja, banyak kok parkir yang liar. Kami juga ragu apakah pengelola parkir melaporkan pendapatan parkir sesuai kenyataan,” kata Pantas.

Menurut Pantas, DPRD mendorong pemerintah

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 2 0



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

## Pajak Pengelola Parkir di Jakarta Bakal Dinaikkan

di Bapemperda, Pemerintah Provinsi DKI akan meminta pengelola parkir tak membebaskan peningkatan pajak kepada konsumen. Dalam penerapannya, tarif parkir tetap normal atau berkisar Rp 5.000 per jam untuk mobil dan Rp 2.000 per jam untuk sepeda motor. Hanya setoran pajaknya yang meningkat dari sekitar Rp 1.000 menjadi Rp 1.500 per jam pada mobil dan sepeda motor dari Rp 400 menjadi Rp 600 per jam.

Penasihat Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan

Indonesia (Hippindo), Tutum Rahanta, mengklaim pengusaha atau pengelola parkir pasti akan mengikuti regulasi dan keputusan pemerintah. Pengusaha pasti tak akan menolak rencana pelaporan obyek pajak secara *online*. Tapi, menurut dia, konsumen atau masyarakat pasti akan terkena efek peningkatan besaran pajak parkir. "Karena pemerintah tak pernah menetapkan parkir mobil dan motor itu harus berapa per jam. Jadi, bisa saja dibebankan ke konsumen lagi," kata dia. ●

## Agar Pengguna Kendaraan Pribadi Berkurang

**PEMERINTAH** DKI Jakarta terus menyempurnakan fasilitas dan sarana transportasi di kawasan Jalan Sudirman-Thamrin. Pemerintah berharap langkah ini membuat warga berpindah dari kendaraan pribadi ke moda transportasi publik. Apalagi, pemerintah akan segera menaikkan tarif parkir di kawasan itu.

### Integrasi Halte Transjakarta-Stasiun Mass Rapid Transit

- Halte Bus Transjakarta dan Stasiun Kereta MRT Bundaran Hotel Indonesia
- Halte Bus Transjakarta CSW dan Stasiun Kereta MRT ASEAN

### Penataan integrasi dan fasilitas

- Pembenahan Stasiun Kereta Api Sudirman
- Pembangunan integrasi Stasiun MRT Dukuh Atas dengan Stasiun KA Sudirman dan Kereta Bandara BNI
- Pembangunan *transit plaza* untuk menunggu pengojek *online*
- Penambahan jumlah bus pengumpan

### Peningkatan fasilitas pejalan kaki

- Pelebaran badan trotoar
- Fasilitas lift, eskalator, dan *track* khusus difabel
- Penambahan aksesibilitas menuju stasiun dan halte

### Pengembangan jalur dan parkir sepeda

- Pembangunan *bike track* di Stasiun MRT dan Halte Transjakarta (rencana)
- Pembangunan dan penataan jalur sepeda sepanjang 23 kilometer dengan lebar 1,5 meter di rute Fatmawati-Bundaran Hotel Indonesia.

### Pengembangan *park and ride*

TARIF:

- **Mobil:** Rp 5.000 per hari
- **Sepeda motor:** Rp 2.000 per hari

LOKASI:

		
■ Lebak Bulus	157	500
■ South Quarter TB Simatupang	80	30
■ Fatmawati	48	100